

BAB II

KERANGKA TEORI/ KONSEP

2.1 Penelitian Terdahulu

Saat meliput peristiwa konflik yang terjadi di masyarakat, media massa melakukan pembingkai atau *framing* terhadap isu-isu konflik yang kompleks sehingga dapat diseleksi dan dirangkai oleh media massa untuk disebarluaskan kepada khalayak (Roluahpuia, 2017, p. 489). Pembingkai atau *framing* yang dilakukan oleh media massa meliputi seleksi dan penekanan terhadap bagian-bagian tertentu dari sebuah konflik yang terjadi di masyarakat (Roluahpuia, 2017, p. 489). Sejumlah penelitian terdahulu menemukan bahwa *framing* yang dibentuk oleh media massa melibatkan bagian yang diliput dan tidak diliput, penulisan fakta, serta gambar yang digunakan dalam membangun narasi terhadap sebuah konflik (Roluahpuia, 2017, p. 489).

Media massa dinilai memiliki kemampuan membingkai sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat agar lebih mudah untuk dipahami oleh khalayak pembaca (Roluahpuia, 2017, p. 489). Kemampuan yang dimiliki oleh media massa dalam melakukan pembingkai juga dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang terjadi di masyarakat (Roluahpuia, 2017, p. 489). Hal ini dibuktikan melalui penelitian Roluahpuia (2017) yang menemukan pembingkai yang dilakukan oleh media massa kerap kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor politik, kepentingan media, dan polarisasi saat terjadi konflik di masyarakat. Selain itu, penelitian yang Ia lakukan juga menemukan saat situasi konflik terjadi, ada hubungan yang meningkat secara signifikan antara media massa dan politik. Aspek tersebut membuat media massa kerap kali menjadi tempat kontestasi kekuasaan dari kedua belah pihak yang berkonflik (Roluahpuia, 2017, p. 490).

Roluahpuia (2017, p. 493) pun menemukan kaitan yang kuat antara media massa dan politik etnis ketika terjadi konflik dalam penelitiannya menunjukkan, terdapat penggunaan bahasa dan penekanan media massa saat memberitakan konflik yang terjadi di masyarakat. Adapun, media massa sering terjebak dalam situasi yang sulit terutama di wilayah yang terpolarisasi sehingga pengaruh media

massa saat memberitakan peristiwa konflik memiliki dua sisi ambivalen yang dapat meningkatkan permusuhan atau menyelesaikan konflik yang terjadi di masyarakat (Roluahpuia, 2017, p. 498).

Temuan dari penelitian yang dilakukan oleh Nandang (2021) menunjukkan media massa memiliki peran untuk mengarahkan masyarakat dalam memaknai peristiwa konflik yang terjadi, sehingga masyarakat dapat mengkritisi konflik yang terjadi dan menciptakan kondisi yang lebih demokratis. Lebih lanjut Ia menjelaskan saat mengkonstruksi konflik yang terjadi bukan hal yang mudah bagi media massa. Ini karena efek dari pemberitaan yang dilakukan oleh media massa memiliki dua sisi yang dapat mempertajam atau mereduksi konflik di masyarakat (Nandang, 2021, p. 17).

Nandang (2021, p. 17) pun menilai media massa memiliki tiga posisi yang penting dalam konflik yang terjadi di masyarakat, di antaranya *issue intensifier* yang mana media massa dapat mempertajam dimensi konflik sehingga menjadi transparan. Kedua, *issue dininsher* yakni media dapat menghilangkan isu yang melibatkan kepentingan media. Ketiga, media massa dipandang sebagai *conflict resolution* yang dapat menjadi mediator dengan menampilkan perspektif dari pihak yang berkonflik. Saat konflik terjadi, media massa menjalankan perannya sebagai *public sphere* untuk berpihak kepentingan masyarakat daripada sekedar menyalurkan kepentingan bisnis dari pemilik media atau kepentingan politik lainnya (Nandang, 2021, p. 17).

Arrosyid & Halwati (2021) pun mengemukakan bahwa media massa memiliki peranan yang penting dalam menyebarluaskan berita kepada khalayak ketika terjadi konflik di masyarakat. Oleh karena itu, media massa perlu menghilangkan unsur kepentingan yang dapat mengurangi objektivitas dalam meliput peristiwa yang terjadi (Arrosyid, & Halwati, 2021, p.222). Menurut mereka pada dasarnya media massa harus bersikap netral dengan mempertahankan ideologinya karena media massa dianggap sebagai representasi dari kepercayaan khalayak. Selain itu, kualitas peliputan media massa dalam situasi konflik diharapkan dapat membantu menyelesaikan konflik yang terjadi.

Namun, faktanya dalam meliput sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat media massa kerap kali dipengaruhi oleh sejumlah konflik kepentingan baik itu bisnis, kepemilikan media, dan ideologi yang dianut oleh media itu sendiri. Hal ini dibuktikan oleh temuan dari penelitian Febriani, Cahyani, & Gelgel (2016, p. 8) yang membuktikan saat mengkonstruksi sebuah peristiwa, media massa kerap kali dipengaruhi oleh kepemilikan media yang mempengaruhi proses produksi sebuah berita. Saat meliput sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat, media massa juga dipengaruhi sejumlah faktor *external* dan *internal* sehingga arah dari pemberitaan kerap kali berorientasi pada politik dari pemilik media (Febriani, Cahyani, & Gelgel 2016, p. 8).

Selain itu, penelitian Solihin & Kurnia (2017, p. 26) menemukan bahwa ketika memaknai peristiwa konflik yang terjadi di masyarakat, media massa dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh masing-masing media. Ideologi ini mempengaruhi orientasi media massa dalam mengkonstruksi peristiwa konflik, yangmana media massa cenderung berpihak pada salah satu pihak yang berkonflik. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi konflik di masyarakat, semakin diperparah dengan keinginan media massa untuk mengontrol arus berita dan wacana dari peristiwa konflik yang terjadi (Oliver & Barret 2017,p. 3).

Penelitian Oliver & Barret (2017, p. 12) mengemukakan dalam upaya mendominasi arus pemberitaan dan kontrol wacana dalam situasi konflik, media massa kerap melakukan propaganda terhadap konflik yang terjadi di masyarakat dengan menekankan dan menghilangkan sejumlah fakta yang ada di lapangan. Mereka menyarankan dalam menghadapi situasi konflik yang terjadi masyarakat perlu mendapatkan informasi yang lebih beragam, tidak hanya mengandalkan informasi dari media arus utama yang dipengaruhi oleh sejumlah kepentingan. Mereka juga menjelaskan agar masyarakat mengonsumsi informasi dari media alternatif yang menawarkan informasi dan perspektif berbeda tentang situasi dari konflik yang terjadi (Oliver & Barrett, 2017, p. 16).

Selaras dengan temuan Oliver & Barrett (2017) penelitian yang dilakukan oleh Holt (2018, p.51) juga menemukan bahwa media arus utama mencoba menyembunyikan atau mendistorsi informasi yang tidak sejalan dengan agenda

politik di Swedia terhadap kebijakan imigrasi di negaranya. Menurut Holt (2018, p. 51) dalam menanggapi situasi tersebut diperlukan skeptisme dengan dasar ketidakpercayaan dan kritik terhadap media arus utama. Hal ini diperkuat dengan asumsi bahwa jurnalis tidak adil atau meliput sebuah peristiwa secara subjektif, dengan mengorbankan akurasi dari sebuah peristiwa hanya untuk kepentingan komersial (Holt, 2018, p. 15). Selain itu, dalam melawan dominasi informasi dari media arus utama Holt (2018) mengemukakan peranan penting dari media alternatif yang dapat mempengaruhi wacana publik dan menentang dominasi informasi dari media arus utama saat terjadi peristiwa konflik di masyarakat (Holt, 2018, p. 52)

Menurut kajian-kajian yang dikemukakan oleh para peneliti sebelumnya, beberapa penelitian terdahulu memiliki latar belakang dan fokus kajian yang berbeda dalam riset pembingkai atau *framing* yang dilakukan oleh media massa saat terjadi konflik. Kebanyakan dari penelitian terdahulu berfokus pada konflik yang melibatkan agama, budaya, dan politik dengan objek penelitian media arus utama. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang akan mengkaji konstruksi realitas yang dilakukan oleh media alternatif di Indonesia tentang konflik agraria yang terjadi di Indonesia.

Jika dihubungkan dengan penelitian Oliver & Barret (2015) dan Holt (2018) penelitian ini akan mendeskripsikan lebih lanjut tentang peranan media alternatif dalam melawan dominasi informasi dan kontrol wacana dari pemberitaan media arus utama yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor kepentingan. Selain itu, saat ini belum banyak penelitian terkait pembingkai atau *framing* yang membahas tentang konflik agraria di Indonesia dengan objek penelitian media alternatif di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menambah ragam diskusi dan memberikan gambaran lebih jauh mengenai konstruksi realitas atau *framing* yang dilakukan oleh media alternatif terhadap konflik agraria di Indonesia.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Konstruksi Sosial Realitas

Teori Konstruksi sosial atau realitas yang diperkenalkan pertama kali oleh Peter Berger dan Luckmann memiliki pemahaman yang luas dalam ilmu sosial, hal ini biasanya dihubungkan dengan sejumlah pengaruh sosial dalam pengalaman setiap individu (Ngangi, 2011, p.1). Realitas sosial memiliki makna ketika dikonstruksikan secara subyektif, diinterpretasikan oleh individu lain, dan secara objektif menetapkan realitas tersebut berdasarkan subjektivitas orang lain dalam sistem sosial (Santoso, 2016, p. 31).

Menurut Berger dan Luckmann 1966 (dalam Dharma, 2018, p.2) manusia berada dalam sebuah kenyataan yang objektif dan subjektif, kenyataan objektif manusia secara struktural dipengaruhi lingkungan yang dimana manusia itu sendiri tinggal. Sementara itu, kenyataan subjektif manusia dipandang sebagai individu yang memiliki ketertarikan tersendiri dalam sosial, manusia memegang kendali atas lingkungan sosialnya dan membentuk dunia sosialnya berdasarkan kreativitas (Dharma, 2018, p. 2).

Berger berpandangan bahwa manusia dan masyarakat adalah produk dialektis, dinamis dan multi-nilai. Proses dialektis sendiri memiliki tiga fase yang disebut momen yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi (Eriyanto, 2002, p. 16) sebagai berikut :

1. Eksternalisasi, adalah Upaya menuangkan ekspresi diri seseorang di dunia, dan dalam aktivitas mental dan fisik. Manusia tidak dapat kita pahami sebagai ketertutupan yang terlepas dari dunia di luarnya. Manusia berupaya menangkap dirinya, dalam proses inilah dapat dihasilkan suatu dunia dengan kata lain manusia menemukan dirinya dalam suatu dunia.
2. Objektivitas, yaitu hasil yang dicapai baik secara mental maupun fisik dan fisik dari kegiatan eksternalisasi, hasilnya manusia menciptakan atau

mengembangkan alat untuk memudahkan kehidupan atau kebudayaan sebagai produk dari eksternalisasi menjadi realitas yang objektif.

3. Internalisasi, proses internalisasi merupakan adopsi individu yang membawa dunia objektif kembali ke kesadaran sebagai subjektif yang dipengaruhi oleh struktur dunia sosial. Berbagai elemen dunia yang telah terobjektifkan ditangkap sebagai gejala realitas di luar kesadaran serta gejala internal bagi kesadarannya.

Realitas tidak terbentuk begitu saja secara ilmiah, realitas terbentuk berdasarkan hasil konstruksi yang dimana hal ini memiliki pemahaman ganda atau plural. Setiap orang dapat membangun realitas yang berbeda berdasarkan pengalaman, keyakinan, pendidikan, dan lingkungan sosial dalam memaknai realitas sosial dari konstruksinya sendiri (Santoso, 2016, p. 39). Dalam konteks penelitian ini, wartawan Project Multatuli menjadi pembuat suatu realitas dalam mengkonstruksi peristiwa konflik agraria di Desa Wadas terhadap khalayak pembaca terkait peristiwa yang terjadi.

2.2.2 Framing

Gagasan mengenai *framing* pertama kali dikemukakan oleh Bateson tahun 1955 sebagai struktur konseptual atau keyakinan yang mengatur pandangan politik, kebijakan, dan wacana serta memberikan kategori standar untuk mengevaluasi realitas. *Framing* kemudian dikembangkan oleh Ervin Goffman pada 1974 yang menilai *frame* sebagai elemen perilaku yang menuntut individu dalam memahami realitas (Aprilianti & Bharata, 2019, p. 18).

Menurut Goffman (dalam Littlejohn & Foss, 2009, p. 407) *framing* digunakan untuk mengurangi kompleksitasnya informasi dengan fungsi sebagai proses dua arah, yaitu membantu menafsirkan dan mengkonstruksi realitas dari peristiwa yang terjadi. Selain itu, *framing* yang dicetuskan oleh Goffman menitikberatkan individu dalam memaknai realitas berdasarkan keyakinan, pengalaman, dan pengetahuan pada tiap individu (Goffman dalam Littlejohn & Foss, 2009, p. 408).

Baran & Davis (2012, p. 322) berpendapat *framing* yang dikembangkan oleh Ervin Goffman merupakan sebuah teori tingkat mikro

yang berfokus pada bagaimana cara individu atau wartawan memandang dunia sosial mereka sehari-hari. Kemudian, beberapa ahli mengambil ide Goffman mengenai *framing* untuk mengembangkan sejumlah konseptualisasi kerangka kerja sebagai berikut, yang pertama mempertimbangkan konteks sosial dan politik ketika *framing* digunakan. Kedua, bagaimana wartawan mengembangkan dan membentuk *frame* pada peristiwa yang ambigu. Ketiga, bagaimana khalayak mempelajari dan menggunakan *frame* untuk memahami makna dari peristiwa yang terjadi. Lalu, yang terakhir konsekuensi sosial dan politik jangka panjang dari penggunaan *framing* yang dilakukan oleh media massa (Baran & Davis, 2012, p. 322).

Sementara itu, Gitlin (1980, dalam Fortner, & Fackler 2011, p. 100) menyatakan *framing* merupakan sebuah prinsip-prinsip yang digunakan oleh seorang wartawan atau media massa dalam menyeleksi, menekankan, dan menghilangkan aspek-aspek tertentu dalam sebuah peristiwa. *Framing* juga diartikan sebagai pendekatan untuk melihat bagaimana sebuah realitas dikonstruksi oleh wartawan atau media massa, dengan tujuan realitas tersebut lebih mudah untuk dipahami oleh khalayak pembaca (Eriyanto (2002, p. 76).

Menurut Fortner & Fackler (2011, p. 601) selama proses *framing*, pesan yang dibentuk oleh wartawan atau media massa telah dikonstruksi dengan menekankan atau tidak menekankan fakta dan menambahkan atau menghilangkan informasi tentang peristiwa yang terjadi dengan tujuan untuk mempengaruhi persepsi pembaca dalam memahami peristiwa tersebut.

Dalam studi media, *framing* dikembangkan melalui sejumlah konsep yang dicetuskan oleh sejumlah ahli. Ada empat model atau konsep analisis *framing* yang biasa digunakan dalam kajian media, antara lain Murray Edelman, William A. Gamson, Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki, dan Robert N. Entman. Berikut adalah beberapa definisi analisis *framing* yang dikemukakan oleh sejumlah ahli (Mubaraq, 2020, p. 60).

Tabel 2.1 Definisi Framing Menurut Sejumlah Ahli

Robert N. Entman	Proses seleksi dari berbagai macam aspek realitas yang berbeda sehingga bagian tertentu dari masalah lebih penting daripada aspek lainnya. Selain itu, juga melibatkan penempatan informasi dalam konteks yang unik sehingga bagian tertentu menerima lebih banyak atribusi daripada yang lain.
William A. Gamson	Cara bercerita atau kumpulan ide yang terorganisir sedemikian rupa dan membentuk konstruksi makna dari sebuah peristiwa yang berkaitan dengan objek suatu wacana. Cara bercerita tersebut membentuk sebuah kemasam, semacam skema atau struktur pemahaman yang digunakan oleh setiap individu untuk mengonstruksi makna dari pesan-pesan yang disampaikan, serta untuk menafsirkan makna-makna pesan yang diterima olehnya.
Todd Gitlin	Sebuah strategi dalam menggambarkan realitas yang dikonstruksi dan disederhanakan sedemikian rupa untuk disajikan kepada khalayak pembaca. Sejumlah peristiwa ditampilkan agar tampak lebih menonjol dan menarik khalayak pembaca. Hal tersebut dilakukan dengan cara seleksi, penekanan, pengulangan dan aspek-aspek tertentu dari sebuah realitas.
David E. Snow & Robert Sanford	Pemberian makna yang digunakan untuk menafsirkan sebuah peristiwa dan kondisi yang relevan. <i>Frame</i> mengorganisasi sebuah sistem kepercayaan dan diwujudkan ke dalam kata kunci, anak kalimat, citra, sumber informasi, dan kalimat tertentu.
Amy Binder	Sebuah kerangka interpretasi yang digunakan oleh individu dalam memposisikan, mengidentifikasi, menafsirkan, dan memaknai sebuah peristiwa secara langsung atau tidak. <i>Frame</i> mengorganisir sebuah peristiwa yang kompleks ke dalam sebuah bentuk dan pola yang mudah untuk dipahami dan membantu individu dalam memaknai sebuah peristiwa..

Sumber: Mubaraq (2020)

Tabel 2.1 Definisi Framing Menurut Sejumlah Ahli (Lanjutan)

Eriyanto	Sebuah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi sebuah isu dan menuliskan berita terhadap sebuah peristiwa. Cara pandang tersebut akhirnya membentuk dan menentukan faktaapa yang diambil, bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan serta bagaimana peristiwa itu diberitakan.
Zhongdang Pan & Gerald M. Kosicki	Sebuah strategi dari membangun dan memproses berita. Perangkat kognisi yang digunakan dalam mengode sebuah informasi, menafsirkan sebuah peristiwa, dan menghubungkan dengan rutinitas dari pembentukan sebuah berita.

Sumber: Mubaraq (2020)

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teori *framing* yang digagas oleh Ervin Goffman dengan konsep analisis *framing* yang dicetuskan oleh Robert N. Entman, untuk melihat bagaimana pembingkaiannya atau *framing* yang dilakukan oleh *Project Multatuli* terkait konflik agraria di Desa Wadas. Menurut Entman (1993 dalam McQuail, 2010, p. 318) *framing* melibatkan seleksi dan arti penting dari sebuah peristiwa, Entman merangkum empat aspek utama dari sebuah *frame*, yaitu mendefinisikan masalah, mendiagnosa penyebab, membuat penilaian moral, dan menyarankan solusi. Keempat aspek utama tersebut meliputi penggunaan kata-kata, frase, sumber informasi, dan menggunakan foto atau video tertentu dalam menggambarkan sebuah realitas dari peristiwa yang terjadi (McQuail, 2010, p. 318).

Tabel 2.2 Konsep *Framing* Model Robert N . Entman

<i>Problem Identification</i>	Melihat bagaimana suatu peristiwa sebagai apa atau sebagai masalah apa?
<i>Causal Interpretation</i>	Peristiwa dilihat dari penyebabnya, apa yang dianggap sebagai penyebab dan siapa yang dianggap sebagai penyebab masalah?
<i>Moral Evaluation</i>	Nilai moral apa saja yang disajikan untuk menjabarkan sebuah masalah, nilai moral yang digunakan melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan?
<i>Treatment recommendation</i>	Menawarkan penyelesaian seperti apa untuk mengatasi masalah atau sebuah peristiwa, jalan atau solusi apa yang ditawarkan.

Sumber: Eriyanto (2002)

Salah satu kajian yang menggunakan teori *framing* untuk menemukan kerangka informasi terkait konflik agraria, dilakukan oleh Fauziah & Rubiyannah (2020) mereka mengkaji keberpihakan media massa berdasarkan kepentingan media massa itu sendiri. Penelitian Fauziah dan Rubiyannah (2020) menggunakan teori *framing* dengan konsep analisis *framing* yang dicetuskan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosick, yang terbagi kedalam empat perangkat analisis, yaitu sintaks, tema, retorika, dan naskah. Keempat perangkat tersebut digunakan untuk membedakan sudut pandang wartawan ketika mereka memilih topik dan menulis berita terkait konflik agraria mengenai pembangunan *Yogyakarta International Airport*

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fauziah & Rubiyah (2020) mengemukakan bahwa kedua media massa yang diteliti menunjukkan perbedaan dalam mengkonstruksi realitas, salah satu media melihat peristiwa tersebut dari segi manfaat setelah mengosongkan pemukiman warga yang dapat meningkatkan kemakmuran provinsi Yogyakarta. Sementara itu, media lain berusaha untuk meyakinkan pembaca bahwa pengosongan pemukiman warga tidak perlu dilakukan, lantaran tidak memberikan keuntungan terhadap warga yang terdampak. Selain itu, media massa tersebut juga mengkritisi tujuan pembongkaran

tersebut, lantaran dianggap tidak sesuai aturan dengan menggunakan kata-kata memojokan pihak pemerintah dan pemilik modal.

Kajian serupa juga dilakukan oleh Solihin & Kurnia (2017, p. 20) dengan menggunakan teori *framing* dengan model analisis *framing* yang dicetuskan oleh Robert M. Entman Entman untuk melihat bagaimana peristiwa konflik mengenai Pabrik Semen Kendeng dimaknai oleh wartawan dan menunjukkan keberpihakan media massa saat mengkonstruksi peristiwa konflik. Hasil kajian Solihin & Kurnia (2017) menunjukkan bahwa media *online* nasional maupun lokal dipengaruhi oleh ideologi yang dianut oleh masing-masing media itu sendiri saat mengkonstruksi konflik.

Kedua media yang menjadi subjek penelitian menunjukkan keberpihakan yang berbeda-beda, media nasional lebih memberikan porsi pemberitaan yang lebih dominan terhadap satu kelompok yang berkonflik. Sementara itu, media lokal memberikan ruang atau porsi pemberitaan yang relatif lebih proporsional bagi kedua belah pihak yang berkonflik. Pada dasarnya *framing* merupakan teori untuk melihat bagaimana wartawan atau media saat bercerita mengenai suatu isu atau peristiwa. Sebagai sebuah metode analisis teks, analisis *framing* memiliki karakteristik yang menekankan pada proses pembentukan teks dari sebuah pesan mengenai suatu peristiwa. Pada penelitian yang dilakukan, *framing* membantu peneliti untuk menjawab bagaimana konstruksi realitas yang dibentuk oleh *Project Multatuli* mengenai konflik agraria di Desa Wadas.

2.2.3 Media Alternatif

Media alternatif muncul sebagai respons dalam melawan kapitalisme dan dominasi dari media arus utama dalam pemberitaan di masyarakat terhadap suatu peristiwa yang terjadi, media alternatif juga menjadi suara atau ruang bagi kaum marjinal di tengah hegemoni wacana media arus utama. Tim O'Sullivan (dalam Ibrahim dan Akhamad, 2014, p.195) mendefinisikan media alternatif sebagai bentuk komunikasi massa yang

menentang politik yang ideal atau terlembagakan, media alternatif menjadi pengkritik terhadap nilai-nilai tradisional sehingga kerap dianggap sebagai media bawah tanah yang radikal. Selain itu, Holt, Figschoue, & Firsschilch (2019, p. 2) beranggapan bahwa media alternatif dapat dicirikan sebagai bentuk pemberitaan yang bersifat demokratis, terbuka, dan nonhirarki dengan tujuan keadilan sosial, bersifat organisasi kolektif serta agenda politik yang cenderung dengan pergerakan sosial.

Media alternatif diperlukan dalam membangun wacana dalam ruang publik, menjadi media yang melayani kelompok-kelompok terpinggirkan dan menjadi lawan dari hegemoni media arus utama dalam akses informasi (Birowo, 2005, p. 135). Menurut Ibrahim dan Akhamad (2014, p. 199) perbedaan dan ketajaman media alternatif dan media arus utama sangat bergantung pada sejumlah faktor diantaranya sosial-ekonomi, politik, budaya yang menjadi latar hadirnya sebuah media. Berikut tabel perbedaan media alternatif dan media arus utama:

Tabel 2.3 Perbedaan Media Arus Utama dan Media Alternatif

Media Arus Utama	Media Alternatif
Big Media	Small Media
Big Business/ Corporate Bloc/Power Elit Large scale publication	Small group/communities/race,ethnic Marginal groups/mass Small scale publictaction
Mainstream Culture	Subculture/minorities/ethic culture
Status quo/ Pro-establishment Hegemony Dominant lifestyle	Anti establishment Counter hegemony Alternative lifestyles
Kapitalisasi	De-Kapitalisasi
Pro-copyright Mass commercial publications Advertising Profit oriented	Anti copyright Non commercial, subsidize Nonprofit

Sumber: Ibrahim dan Akhamad (2014)

**Tabel 2.4 Perbedaan Media Arus Utama dan Media Alternatif
(Lanjutan)**

Profesionalisasi	De-Profesionalisasi
Conservative Affirmative Konstruksi Basic concerns for profit	Opposition, radical, critical, deviance Dekonstruksi Basic conference for ideas

Sumber: Ibrahim dan Akhamad (2014)

Konsep Konsep media alternatif adalah dekonstruksi media massa yang ketat atas dasar keahlian, kapitalisasi, dan kontrol. Ketiga aspek ini perlu direstrukturisasi untuk membangun gaya peliputan berita di masyarakat yang selama ini hanya dilihat sebagai komoditas oleh media arus utama, media alternatif dipandang relevan mampu mencerminkan kegiatan demokrasi langsung dan desentralisasi sebagai solidaritas kolektif. Selain itu, media alternatif juga digagas dan digunakan oleh kelompok marjinal atau minoritas sebagai ruang untuk mempertahankan suaranya atas suatu isu atau peristiwa. Singkatnya, media alternatif adalah alat melawan hegemoni informasi yang disebarluaskan oleh media arus utama yang telah dikooptasi oleh kekuatan politik-ekonomi (Maryani & Adiprasetio, 2018, p. 263).

Beberapa studi menyimpulkan bahwa media alternatif adalah jawaban atas hegemoni informasi media arus utama, sekaligus memberikan informasi yang lebih beragam kepada publik. Salah satu kajian dengan menggunakan konsep media alternatif dilakukan oleh Jauhari (2015) yang mengkaji bagaimana jurnalisme populer merupakan bentuk media alternatif melawan hegemoni media arus utama. Penelitian yang dilakukan oleh Jauhari (2015) menyimpulkan bahwa media alternatif hadir sebagai jawaban atas dominasi budaya media arus utama yang mendikte kriteria, etika, dan nilai budaya yang dapat diterima secara sosial. Selain itu, media alternatif juga dapat menjadi gerakan budaya dan sarana alternatif untuk memperkuat masyarakat sipil dalam menyebarluaskan gagasan.

Penelitian serupa tentang konsep media alternatif juga pernah dilakukan oleh Birowo (2005) yang mengkaji media massa di Indonesia terkait isu arus informasi, membahas secara mendalam isu komunikasi

politik, dan pengaruh hegemoni media arus utama serta pembentukan media bagi masyarakat untuk berpartisipasi di ruang publik. Kajian ini dibagi menjadi tiga bagian yang menghubungkan realitas media di Indonesia, pentingnya media alternatif, dan terbentuknya media alternatif seperti radio komunitas.

Kesimpulan dari penelitian yang dilakukan oleh Birowo (2005) mengemukakan hegemoni informasi membentuk resistensi dalam bentuk alternatif, radio komunitas merupakan salah satu contoh upaya untuk melawan atau mengganggu hegemoni arus informasi berita. Selain itu, radio komunitas atau media alternatif memberikan pilihan informasi yang lebih beragam kepada masyarakat untuk merespon suatu peristiwa atau isu yang terjadi di masyarakat.

Pada hakekatnya, media alternatif merupakan kutub dari media arus utama yang berseberangan baik dari segi ideologi, manajemen, keberpihakan, maupun publikasi. Menurut Allifiansyah(2015, p.12) perkembangan media alternatif di Indonesia memiliki sejarah panjang, dari masa kolonial hingga reformasi dan hadirnya internet memperkuat perlawanan terhadap pemerintahan otokratis. Ia juga menambahkan perkembangan media alternatif sangat bergantung pada kondisi sosial, politik, dan ekonomi yang ada di masyarakat (Allifiansyah, 2015, p. 12).

Merujuk pada konsep dari media alternatif yang sudah dipaparkan oleh peneliti, media alternatif yang dipilih sebagai subjek penelitian ini adalah *Project Multatuli*. *Project Multatuli* dipilih lantaran menjadi media alternatif yang kerap kali menyuarakan suara-suara yang terpinggirkan, komunitas, dan isu-isu yang kerap kali diabaikan. Selain itu, peneliti memilih *Project Multatuli* lantaran aktif dalam menyebarkan informasi di pelbagai sosial media maupun situs resminya mengenai isu-isu yang terjadi di Indonesia, terutama terkait konflik agraria di Desa Wadas (*Project Multatuli*, 2021, para. 1).

2.2.4 Media dan Konflik

Media massa berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi yang ada, media massa tidak lagi dipandang sebagai sarana pemberitaan semata tetapi telah menjadi pusat informasi. Perkembangan teknologi informasi semakin memudahkan semua lapisan masyarakat untuk mengakses informasi secara bebas dan terbuka. Kondisi seperti ini memungkinkan masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda terhadap informasi yang beredar (Santosa, 2017, p. 207).

Lebih lanjut Nandang (2021, p. 16) berpendapat bahwa media massa sebagai kekuatan strategis dalam menyebarkan informasi merupakan contoh bentuk pemerintahan sosial yang dapat mempengaruhi dan menentukan bentuk standar sosial. Ketika menyoroti konflik yang terjadi di masyarakat, media massa memiliki peran yang penting untuk menyadarkan publik. Namun, hal tersebut ditutup-tutupi oleh mekanisme selama rezim orde baru yang mengontrol dan sensor terkait informasi terkait konflik yang terjadi (Nandang, 2021, p. 16).

Ketika konflik muncul, media massa perlu memberikan informasi yang akurat untuk menenangkan suasana dan tidak menjadi agen eskalasi dari konflik yang terjadi. Media harus mencari aspek-aspek yang dapat meredam konflik, walaupun faktanya media seringkali memberikan fakta yang memperuncing konflik (Santosa, 2017, p. 208). Menurut Nuswantoro (2013, p. 507) jika melihat fungsi dari hadirnya media untuk *to inform*, *to educate*, *to control*, dan *to entertain* menjadi sangat tidak mungkin media menjadi bagian dari konflik. Namun, dalam kajian teoritis dan temuan sejumlah ahli membuktikan hal yang justru sebaliknya, media menjadi penyebab terjadi sebuah konflik yang terjadi masyarakat.

Sementara itu, dalam konteks peliputan konflik, media massa melakukan *Agenda-Setting* dengan mencermati fakta-fakta yang ada di lapangan, hasil dari pemberitaan yang dilakukan oleh media massa memiliki dua aspek ambivalen yang dapat memperburuk atau mendamaikan konflik (Nandang, 2021, p. 17). Menurut Nandang (2021, p. 17) media massa

memiliki tiga posisi dalam memberitakan konflik, yang pertama *issue intensifier* yang di mana media memunculkan konflik dan mempertajamnya sehingga terlihat dimensi keseluruhan dari konflik. Kedua *conflict diminisher*, media menghilangkan sebuah isu terlebih lagi jika isu tersebut menyangkut kepentingan dari media itu sendiri. Ketiga *conflict resolution*, media menjadi mediator dengan memberikan perspektif serta memberikan arah pada penyelesain konflik

Salah satu kajian tentang peran media massa saat memberitakan konflik di Indonesia dilakukan oleh Sukma (2020) yang mengkaji pembentukan informasi tentang tindakan rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di Surabaya pada 2019. Penelitian yang dilakukan oleh Sukma (2020) menggunakan konsep analisis *framing* yang dicetuskan oleh Zhongdan Pan & Gerald M. Kosicki serta menggabungkan konsep jurnalisme perdamaian yang digagas oleh Johan Galtung, dengan tujuan untuk melihat solusi yang ditawarkan oleh kedua media yang menjadi subjek penelitian.

Penelitian Sukma (2020) menunjukkan bagaimana media massa saat memberitakan konflik dengan mempertajam dimensi dari konflik yang terjadi. Salah satu media yang menjadi subjek penelitian, secara terang-terangan menyebut pelaku rasisme adalah aparat keamanan. Sementara itu, media lain memojokkan aparat keamanan atas tindakan represif dalam mengamankan mahasiswa Papua. Selain itu, temuan dari penelitian Sukma (2020) mengemukakan kedua media massa yang menjadi subjek penelitian berorientasi pada perdamaian, kebenaran, solusi, dan penyelesaian yang memberikan ruang pemberitaan yangimbang serta menuntut penyelesaian masalah dari pihak keamanan.

Mengacu pada penjabaran konsep media dan konflik yang sudah dijelaskan oleh peneliti, konsep ini digunakan untuk melihat bagaimana peran media alternatif dalam memberitakan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Tidak hanya itu, konsep ini juga membantu peneliti dalam

melakukan analisis terhadap pemberitaan yang dilakukan oleh *Project Multatuli* terkait konflik agraria di Desa Wadas.

2.2.5 Konflik Agraria

Selama dua tahun terakhir, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi peningkatan konflik agraria sepanjang tahun 2020 hingga 2021 di sektor pertambang sebesar 167% atau 30 kasus pada 2021 dari sebelumnya 12 kasus di tahun 2020 (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2021, p. 17). Selain itu KPA juga mencatat konflik agraria di sektor pertambangan mengakibatkan korban sebanyak 161.136 KK pada tahun 2020 meningkat menjadi 198.859 KK. (Konsorsium Pembaruan Agraria, 2021, p. 17).

Sementara itu, konflik agraria dapat diartikan sebagai konflik yang muncul akibat adanya hubungan antara orang atau kelompok terkait permasalahan bumi dan sumber daya alam. Menurut Zakie (2016, p. 49) Penyebab dari konflik agraria didasari oleh dua faktor, yaitu faktor hukum dan faktor nonhukum. Faktor hukum dapat berupa tumpang tindihnya peraturan yang ada sebagai payung hukum bagi kebijakan pertanahan di Indonesia. Selain itu, tumpang tindihnya peradilan secara perdata tetapi tidak dengan pidana dapat menjadi penyebab terjadinya konflik (Zakie, 2016, p. 49). Ia juga menambahkan bahwa terdapat faktor nonhukum yang didasari oleh lima hal, yaitu tumpang tindih penggunaan tanah, nilai ekonomis tanah, kesadaran masyarakat yang meningkat, pertumbuhan jumlah penduduk, dan kemiskinan.

Tanah dipandang sebagai aset yang memiliki banyak manfaat dalam berbagai aspek, secara ekonomis tanah menjadi sumber kekayaan baik sumber daya ekonomi atau modal ekonomi. Secara sosial tanah digunakan sebagai bangunan untuk hunian yang memberikan nilai kehormatan dan secara budaya tanah dipandang ke arah spiritualis (Zuber, 2016, p. 153). Keberadaan tanah menjadi penting bagi manusia dalam membentuk hubungan yang erat antara manusia dengan tanahnya. Hubungan tersebut

akan menciptakan sebuah proses yang dialektik bagi kehidupan manusia di dalam masyarakat. Hubungan ini akan menentukan dan mempengaruhi struktur hubungan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bahkan manusia dengan negaranya (Zakie, 2016, p. 43).

Beberapa konflik agraria yang terjadi di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain pertambangan, perkebunan kelapa sawit, pembangunan infrastruktur, dan kemajuan kawasan ekonomi. Lebih jauh lagi, konflik agraria yang terjadi berdampak negatif terhadap kelangsungan kehidupan, ekonomi, dan lingkungan. Salah satu kajian tentang dampak buruk konflik pertanahan dilakukan oleh Sadewo, Sudjarwo, & Darsono (2014) yang mengkaji tentang dinamika konflik pertanahan dalam kehidupan sosial masyarakat di Sendang Ayu dan Surabaya, Kabupaten Padang Ratu, Lampung Tengah.

Kajian yang dilakukan oleh Sadewo, Sudjarwo, & Darsono (2014) menyimpulkan bahwa dinamika konflik yang berlangsung sejak 1970 disebabkan oleh persewaan tanah nonkontrak yang memicu kekerasan terhadap warga. Selain itu, dampak konflik yang berlangsung lama menimbulkan tiga dampak besar lainnya yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan.

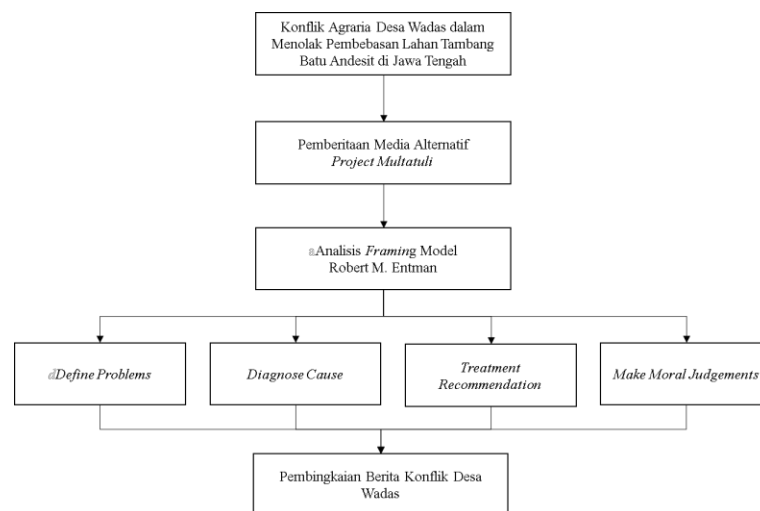
Kajian serupa juga menunjukkan bahwa regulasi untuk menangani konflik agraria, justru menimbulkan masalah baru yang memperparah kondisi konflik yang terjadi. Penelitian Zakie (2016) membahas bagaimana konflik tanah di Indonesia tidak dapat diselesaikan karena menjadi masalah hukum, politik, ekonomi, dan hak asasi manusia yang kompleks (Zakie, 2016, p. 41).

Kajian yang dilakukan oleh Zakie (2016) mengemukakan konflik agraria menjadi isu yang selalu muncul dan aktual seiring perkembangan penduduk, pembangunan, dan meluasnya akses berbagai pihak dalam urusan permodalan. Selain itu, konflik agraria juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti distribusi penerima manfaat yang tidak merata dari

sumber daya alam yang ada, pemekaran kelompok di suatu wilayah, aktivitas ekonomi, dan pertumbuhan penduduk.

Lebih lanjut, Zakie (2016) menjelaskan bahwa tanah sebagai hak dasar memiliki arti sebagai bentuk eksistensi, kebebasan, dan harkat seseorang, yang mana negara wajib memberikan jaminan atau kepastian hukum atas hak tanah tersebut. Peneliti menggunakan konsep konflik agraria yang sudah dipaparkan untuk mengidentifikasi sejumlah aspek yang menyebabkan terjadinya konflik. Selain itu, konsep konflik agraria juga membantu peneliti untuk memahami bagaimana masyarakat menghadapi konflik serta solusi yang ditawarkan dari konflik agraria yang terjadi di Desa Wadas.

2.3 Alur Penelitian



Gambar 2.1 Alur Penelitian

Berikut alur penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini. Menggunakan analisis *framing* model Robert M. Entman untuk mengetahui bagaimana konstruksi realitas yang dibentuk oleh *Project Multatuli* pada peristiwa konflik agraria warga Desa Wadas yang menolak pembukaan tambang batu andesit, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.